

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
- Davis, Keith, and Newstrom, John,W. (2002). *Organizational Behavior At Work*. New York: 11edition. Mc Graw - Hill
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gomes, Faustino Cardoso. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. , Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moenir. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, P. Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi. Edisi Sembilan, Jilid 2. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sedarmayanti. (2001). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik* . Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

### Dokumen-dokumen

Pertimbangan PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Nunukan No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor – Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Nunukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.